

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018).

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011).

_____, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011).

Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung : Armico, 1983).

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).

Basah, Sjachran, Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DI Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008).

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2006).

- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, (Bali : Udayana University Press, 2021), diakses dari [https://repository.undwi.ac.id/public/files/penelitian/0828038101_DR.-I-MADE-WAHYU-CHANDRA-SATRIANA,-S.H.,-M.H. UNDWI Sistem-Peradilan-Pidana-\(Full-Book\) 14800.pdf](https://repository.undwi.ac.id/public/files/penelitian/0828038101_DR.-I-MADE-WAHYU-CHANDRA-SATRIANA,-S.H.,-M.H. UNDWI Sistem-Peradilan-Pidana-(Full-Book) 14800.pdf)
- Koesnan, R. A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), diakses dari <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>, pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 18.49 WIB.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1995).
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Denpasar : CV Mandar Maju, 2005).
- Narwoko, J., dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009).

- Nelson, Febby Mutiara, *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020).
- R. Subekti dan R. Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978).
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soemitro, Ronny Haniatjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).
- Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2020).
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018).
- Sugiharto, R., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Semarang : Unissula Press, 2012).
- Suyanto, H., *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, Maret 2018).
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011).

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017).

b. Jurnal dan Artikel

Australia's Federal Prosecution Service, "*What is the difference between a closed and open court*", diakses dari <https://victimsandwitnesses.cdpp.gov.au/what-difference-between-and-open-and-closed-court#:~:text=Sometimes%20the%20judge%20or%20magistrate,in%20court%20on%20that%20day.>, pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 19.54 WIB.

Budiawan, Akhmad, "*Persidangan Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Bintuhan dan Pengadilan Negeri Cilacap)*", Jurnal Idea Hukum 2, Volume 2, Nomor 2, Universitas Jenderal Soedirman, Oktober 2016, diakses dari <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/79>, pada tanggal 2 September 2022, pukul 20.19 WIB.

Fitri Jayanti E. P., Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan*", Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 3, Nomor 1, Fakultas

Hukum Padjadjaran, 2021, diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/718>, pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 17.36 WIB.

HAG/M-22, “*Sidang Tertutup, Bukan Sekadar Larangan Masuk Ruang Sidang*”, Hukum Online, 16 Januari 2015, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sidang-tertutup--bukan-sekadar-larangan-masuk-ruang-sidang-lt54cef128994d1?page=3>, pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 20.20 WIB.

Kenasihen Ginting, J. A. Raja, “*Masalah Dikhotomi Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, Era Hukum, Volume 5, Nomor 4, Oktober 1999, diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5418>, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 07.00 WIB.

Lalandos, Jusuf, “*Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*”, Lex Crimen, Volume IX, Nomor 2, Universitas Sam Ratulangi, April-Juni, 2020, diakses dari <file:///C:/Users/Windows/Downloads/28560-58841-1-SM.pdf>, pada tanggal 10 September 2022, pukul 17.48 WIB.

Ni Putu Noni Suharyanti dan Kadek Endra Setiawan, “*Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Advokasi, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Saraswati Denpasar, 2017, diakses dari <http://e->

journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/332, pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 21.43 WIB.

Osamah Al-Naimat, Noor Akiaf Al-Dabbas, dan Mohammad Mufdi Faleh Maaqqbeh, “*Transition to E-Litigation as a Mechanism to Activate E-Court in Jordan: An Analytical Study*”, *Journal of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, Volume 24, Issue 1, 2021, diakses dari <https://www.abacademies.org/articles/transition-to-elitigation-as-a-mechanism-to-activate-ecourt-in-jordan-an-analytical-study-10492.html>, pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 20.13 WIB.

Santoso, Widi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan*”, *Lex Crimen* Volume III, Nomor 4, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Agustus-November 2014, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6098>, pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 17.36 WIB.

Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa, dan Dian Latifiani, “*Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19*”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Oktober 2021, diakses dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/15864>, pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 17.15 WIB.

University of Baltimore Law Forum, “*When Can the Courtroom Be Closed in Criminal Proceedings*, *Frederick W. Goudry III*”, Volume 21,

Number 1 Fall, 1990, diakses dari <https://scholarworks.law.ubalt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1577&context=lf>, pada tanggal 7 Juli 2022, pukul 16.01 WIB.

c. Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016), diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

The Law Dictionary, diakses dari <https://thelawdictionary.org/closed-hearing/>, pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 19.54 WIB.

d. Berita Daring

Sistem Informasi Online Perlindungan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Rasio Anak Korban Kekerasan*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 22.19 WIB.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021*, diakses dari <https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/laporan/laporan-tahunan/3603-laporan-pelaksanaan-kegiatan-direktorat-jenderal->

[badan-peradilan-umum-tahun-2021.html](https://www.badan-peradilan-umum-tahun-2021.html), pada tanggal 23 Januari 2023, pukul 08.17 WIB.

e. Wawancara

Achmad, Muhammad Musashi, *Wawancara Online*, Pengadilan Negeri Bulukumba, (Semarang, 27 Oktober, 2022).

f. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban *jo*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak.

Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020; Nomor PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/DJU/SK/HM.02.3/1/2023 tentang

Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan Secara Daring (Dalam Jaringan) Pada Lingkungan Peradilan Umum.